

BIROKRASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Baharuddin Thahir

INTEGRITAS KEPEMIMPINAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL

Syarir

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Agus Rinaldi

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Rizki Pratiwi

INDONESIA MENGANUT MODEL PLULARIST DEMOKRASI

Enden Adipati Koma

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sualb Ibrahim

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh : Suaib Ibrahim

Abstrak : Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudarnya sifat kegotong royongan dan partisipasi masyarakat adalah salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak terbuka. Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotype dan skeptisme di masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah yang memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang menyakinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba meliputi: 1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PNPM Mandiri Perkotaan; 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri; 3) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil PNPM Mandiri; 4) partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil PNPM Mandiri.

Kata Kunci :

Abstract : The condition of social capital and people's behavior and waning nature weaker kegotong royongan and community participation is one of them caused by the decisions, policies and actions of the poverty program managers and leaders who have tended unfair, not transparent and not open. Giving rise to suspicion, stereotyping and skepticism in the community.

Empowerment refers to the ability of people, especially the vulnerable and weaker groups who have the power or ability to (a) meet the basic needs so that they have freedom (freedom), (b) reaching productive resources that ensure they can increase revenue and gain items and services they need, and (c) participate in the development process and the decisions that affect them.

Community participation in the National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri in Bulukumba include: 1) community participation in program planning PNPM Urban; 2) public participation in the implementation of PNPM Mandiri; 3) public participation in the utilization of the results of PNPM Mandiri; 4) public participation in the evaluation of the results of PNPM Mandiri.

Keyword :

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak lepas dari

ikemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dijumpai di Indonesia, Srilangka, Banglades, Ruanda (Afrika), Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Perancis, Australia, Saudi Arabia dan negara-negara lainnya.

Kemiskinan memiliki banyak definisi. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subjektif dan

*E-mail : suaibipdn@gmail.com

komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsep mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, sejatinya dalam kemiskinan menyangkut pula dimensi material, sosial dan kultural.

Dari masalah tersebut, maka kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam artian jangan lagi dalam menyelesaikan kemiskinan bersifat parsial dan sektoral. Karena hal tersebut dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (*gotong-royong*, *musyawarah*, *keswadayaan* dan lain-lain). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak terbuka. Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotype dan skeptisme di masyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi kepada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula

bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada pada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat diwilayahnya, terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada diwilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakterdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada dilingkungan, pada akhirnya mendorong mereka bersikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, selalu mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, bahwa situasi kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi perilaku sikap dan cara pandang (*paradigma*) masyarakat yang belum berdaya. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan selaku Ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan membuat keputusan tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu suatu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Inti kegiatan PNPM Mandiri .

di masyarakat Kelurahan/Desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelebagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (good governance) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis rumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, .
2. Adakah faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Secara etimologi istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct (menggerakkan). (Ulbert S. 1989:2). Sedangkan secara terminologi, administrasi bias diartikan secara sempit dan secara luas. Menurut Prajudi Atmosudiro (1984:4) secara sempit administrasi identik dengan tata usaha yaitu mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Sedangkan pengertian administrasi secara luas, The Liang Gie dan Soetarto

(1980:9) mengemukakan bahwa : "Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu". Sondang P. Siagian (2001:3) menjelaskan bahwa "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya". William H. Newman dalam Soewarno Handayani (1996:2) mengemukakan: "Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal" (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama). J.E. Walters dalam Ulbert silalahi (1989:10) mengemukakan "Administration is the process of planning, organizing, managing appraising and controlling an enterprise" (Administrasi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, penafsiran dan pengawasan suatu perusahaan). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dirinci beberapa ciri pokok untuk disebut administrasi, yaitu: 1). sekelompok orang; artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi, jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2). kerjasama; artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih berkerjasama; 3). pembagian tugas; artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama disebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas; 4). kegiatan yang runtut dalam suatu proses; artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan. 5). tujuan; artinya suatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama. Coralie Bryant dan Lois White dalam Fiagan (2002:21) mengemukakan pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa

depannya melalui lima implikasi utama: 1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*); 2). pemabnguan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai serta kesejahteraan (*equity*); 3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*); 4). pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*); 5). pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Zulkarnaen Nasution (1987:86) "Dalam pengertian sehari-hari yang sederhana dapatlah disebut bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka". Sedangkan Sonda P. Siagian (2001:4) menjelaskan bahwa "Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu neagra bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Apabila pengertian-pengertian di atas disimak secara cermat, akan muncul kepermukaan paling sedikit enam ide pokok, yaitu Pertama, pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*neverending*). Kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, menengah dan pendek. Dan perencanaan berarti mengambil keputusan sekarang tentang masalah-masalah yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Keempat, recana pemabangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara/bangsa untuk berkembang, sedangkan perubahan mengandung makna bahwa suatu negara/bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain. Kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Keenam, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejewantah dalam bidang politik, ekonomi, sosiall budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dari pengertian tersebut secara implisit menunjukan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya. Para politisii (baik di tingkat pusat maupun daerah) dengan kekuatan sosial politiknya, harus turut berperan; para ilmuwan dan cendikiawan ditantang untuk memberikan sumbangsuhnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; para

pembentuk opini (opini leaders) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan social (social control); bahkan "rakyat jelata" pun harus ikut dilibatkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "empowerment". Secara etimologi kata pemberdayaan berasal dari kata daya artinya. Kekuatan atau kekuasaan.

Suharto (2005:58) menjelaskan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) ; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang menyakinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berkaitan dengan pemberdayaan Suhendra (2006:81) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat di lihat dari berbagai dimensi, yaitu konsep, proses, tujuan, dan indikator.

Dilihat dari dimensi konsep, pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang mulia karena sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Suatu cita yang idelais, suatu das sollen. Pemberdayaan masyarakat analogis dengan konsep demokrasi dan kesejahteraan sosial serta kedaulatan rakyat. Dengan kondisi pemberdayaan masyarakat yang tercipta disuatu masyarakat bangsa, maka akan terbentuk suatu sinergis berbagai komponen bangsa ya pemerintah ya masyarakat serta pengusaha. Akan terbentuk tatanan masyarakat yang harmonis, dinamis terhindar dari konflik-konflik sosial yang merugikan.

Dilihat dari dimensi proses, konsep

pemberdayaan telah menjadi kuasa kata diberbagai tulisan, lokakarya, seminar dan sebagainya lebih dari tiga dasa warsa di Indonesia. Kita telah familier dengan istilah people empowerment, people centered development, demokrasi, kesejahteraan social, kedaulatan rakyat, masyarakat madani (civil society). Suatu cita ke realita ternyata khususnya di Indonesia merupakan proses yang memerlukan waktu cukup panjang dan memerlukan banyak pengorbanan Munir pejuangan hak-hak azasi manusia Ketua Yayasan Kontras, yang wafat di pesawat terbang secara misterius. Marsinah pejuang buruh wanita di Jawa Timur yang juga wafat mengerikan. Peristiwa Semanggi 1997 beberapa orang mahasiswa yang tewas tertembus timah panas. Mereka adalah korban-korban pejuang keadilan dan pemberdayaan yang hingga kini belum terungkap secara tuntas. Hingga kini pemberdayaan masyarakat masih jauh dari kenyataan dan masih memerlukan proses Perjuangan, baru merupakan wacana dan retorika. Pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya tidak sederhana seperti yang kita ucapkan berkaitan dengan aspek kemampuan rakyat, kesejahteraan, kultur, struktur maupaun "political will" penguasa.

Akan tetapi pemberdayaan masyarakat tidak serta merta terbentuk, masyarakat berangkat dari awal untuk dimotivasi mengartikulasikan peluang yang baru tersedia, akan memakan waktu berproses. Diperlukan banyak pemimpin-pemimpin lokal pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari dimensi tujuan, pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratisasi, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berkreativitas, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola asset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Inabrata Bhattacharyya (dalam Ndraha 1987:102) mengartikan "Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama".

Dari kedua pandangan tentang partisipasi diatas, menunjukkan bahwa setiap pemeran partisipasi harus memiliki integrasi dan transedensi dalam kerangka perbuatan bersama dengan manusia lain, mempertahankan hirarki nilai-nilai. Dalam filsafat tradisional transedensi dan integrasi ini merupakan kodrat pribadi dipandang sebagai eksistensi seseorang karena akal pikirannya, sehingga manusia memiliki prinsip diri sedang kodrat sosial adalah kodrat yang lahir karena kodrat akal memungkinkan manusia bersifat realistik dalam perbuatannya bersama dengan orang lain. Hal tersebut diperkuat oleh E. Djadjaatmaja (1988:69) bahwa: "Partisipasi sebagai unsur pokok pribadi adalah sekaligus sebagai faktor pembentuk setiap kebersamaan manusia. Oleh karena itu aksioma partisipasi pribadi adalah juga partisipasi sosial dalam mewujudkan modal pembangunan bernuansa kerakyataan".

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (Team Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11). Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi:2005:111).

Selanjutnya, bila partisipasi masyarakat dikaitkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri maka hal tersebut merupakan fungsionalisasi segala potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang kondusif, yang ditujukan pada peningkatan

kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pembangunan sumber daya alam berupa pembangunan fisik dan teknologi. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat meningkatkan potensi sumber daya alam secara fungsional seperti pembangunan irigasi, jalan dan lain sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia yaitu dapat terlaksananya suatu aktivitas pembangunan. Ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, Thoha (1990b:73) mengemukakan bahwa: Partisipasi adakalanya dilakukan secara mandiri dan adakalanya dilakukan dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi policy yang bakal dibuat. Partisipasi mobilisasi adalah keikutsertaan rakyat/masyarakat dalam pemerintahan dengan cara mobilisasi oleh pihak lain.

Partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri yaitu keterlibatan masyarakat dalam segala jenis kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan dilingkungkannya dengan cara memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan, materi dan tenaga. Holil Sulaiman (dalam Nurmaya Yusri, 1993:3) merumuskan bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut : 1). partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka. 2). partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang, dana dan sarana. 3). partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Dari beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan diatas, secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni: partisipasi material dan non material. Partisipasi material adalah keikutsertaan dalam pemberian sumbangan berupa uang atau barang, sedangkan partisipasi non material dapat berupa sumbangan pikiran atau gagasan yang dapat diterima sebagai masukan bagi pelaksanaan program kegiatan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat mempunyai nilai yang sangat berarti dalam PNPM Mandiri. Partisipasi

bukan hanya kesediaan memberi sumbangan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan, tetapi juga melibatkan pikiran dan prasarana melalui proses interaksi dan musyawarah sehingga dirasakan bahwa partisipasi dilaksanakan secara sukarela, bukan paksaan bagi orang yang berperan serta.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, maka diharapkan metode deskriptif tersebut berperan sebagai alat atau pisau analisis yang dapat membedah dan mengungkap fakta yang ada sebenarnya di

Kabupaten Bulukumba mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Definisi Konsep dan Operasionalisasi konsep

Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diartikan sebagai adanya sejumlah faktor yang menyebabkan PNPM Mandiri berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan salah satu faktor penyebab tersebut adalah faktor partisipasi aktif masyarakat yang berlangsung sesuai dengan sistem dan mekanisme partisipasi. Operasionalisasi konsep digambarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1: Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
1	2	3
Partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri ,	a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PNPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti rapat dalam penyusunan dan pengesahan rencana program. 2. Memberikan ide atau masukan tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan rencana. 3. Memberikan ide atau masukan tentang program yang perlu diprioritaskan. 4. Memberikan ide tau masukan tentang penetapan sumber-sumber pembiayaan program yang direncanakan. 5. Memberikan ide atau masukan tentang siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan program sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki dan. 6. Menyebarluaskan rencana program kepada warga masyarakat.
	b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi tenaga pelaksanaan program 2. Memberikan sumbangan berupa uang dalam program. 3. Memberikan sumbangan berupa barang atau material dalam program. 4. Memberikan sumbangan berupa tenaga (fisik) dalam program. 5. Memberikan sumbangan berupa uang dan barang, atau uang dan tenaga, atau barang dan tenaga dan. 6. Memberikan sumbangan berupa uang, barang dan tenaga.
	c. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil PNPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan fasilitas program yang telah dibuat. 2. Memelihara kebersihan, fasilitas program. 3. Memelihara keindahan fasilitas program. 4. Memelihara keamanan fasilitas program dan. 5. Memelihara kenyamanan fasilitas program.
	d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil PNPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pertemuan evaluasi hasil program. 2. Memberikan masukan, idea tau gagasan dalam pertemuan evaluasi hasil program dan. 3. Melestarikan hasil-hasil program.

Populasi

Populasi disini adalah keseluruhan objek penelitian yang memenuhi syarat tertentu dan merupakan sumber pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh Rukun Tetangga yang mengikuti program PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba berjumlah orang 1.870 RT sebagaimana pada ttabel berikut:

Tabel 2: Jumlah Rukun Tetangga Yang Mengikuti Program PNPM Mandiri Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

	Kecamatan	
1	Bulukumpa	318
2	Gantarang	305
3	Ujung Loe	262
4	Kajang	260
5	Rilau Ale	232
6	Bontotiro	156
7	Kindang	128
8	Herlang	114
9	Bontobahari	95
	Jumlah	1.870

Sampel

Adapun cara penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan "two stage cluster sampling" yaitu sebagai berikut :

Tahap pertama, menentukan jumlah Kecamatan, yang akan dijadikan sampel. Dengan mengambil sampel fraction sebesar 25 %, maka jumlah kecamatan yang dijadikan sampel adalah:

$$\frac{25}{100} \times 9 = 2 \text{ Kecamatan (pembulatan)}$$

Ket: 9 adalah jumlah kecamatan yang mengikuti program PNPM di Kabupaten Bulukumba.

Adapun penentuan kecamatan adalah diambil secara acak berdasarkan kecamatan terbanyaknya rumah tangganya dan yang tersedikit rumah tangganya, hasilnya adalah :

1. Kecamatan Bulukumpa dengan jumlah Rukun Tetangga = 318 orang
2. Kecamatan Bontobahari dengan jumlah Rukun Tetangga = 95 orang

Dari data tersebut jumlah keseluruhan sampel adalah 413 Rukun Tetangga.

Tahap Kedua, menentukan jumlah sampel masing-masing Kecamatan dengan rumus :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n \text{ dimana}$$

- n_i = Besar sampel untuk stratum i
 N_i = Total sub pupulasi dari stratum i
 N = Total populasi
 n = Besarnya sampel

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data serta keterangan lainnya dalam penelitian terhadap suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu dengan studi lapangan sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan.

Teknik Analisa Data

Dalam tehnik ini, penulis gunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, display data dan interpretasi data. Kualitas jawaban atau alternatif jawaban dengan besaran nilai sebagai berikut :

1. Jawaban "selalu" diberi nilai 5.
2. Jawaban "sangat sering" diberi nilai 4.
3. Jawaban "sering" diberi nilai 3.
4. Jawaban "kadang-kadang" diberi nilai 2.
5. Jawaban "tidak pernah" diberi nilai 1.

Setelah kualitas jawaban atau alternatif jawaban diketahui nilainya atau skornya, lalu dilakukan sebagai berikut :

Perhitungan nilai/skor rata-rata

Untuk menentukan nilai/skor rata-rata dari jawaban digunakan rumus:

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{\text{Frekuensi jawaban (f)} \times \text{skor}}{\text{Jumlah responden (n)}}$$

Penentuan Persentase

Untuk menentukan persentase digunakan rumus :

Frekuensi jawaban (f)

Persentase =

$$\frac{\text{Frekuensi jawaban (f)}}{\text{Jumlah responden (n)}} \times 100\%$$

Penentuan Kriteria Hasil Nilai/Skor rata-rata

Untuk mengetahui atau menentukan jawaban responden dari masing-masing pernyataan yang termasuk sangat baik sekali, baik sekali, baik, kurang baik, dan kurang baik sekali, maka terlebih dahulu ditentukan skala interval sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Jawaban Pengukuran (R)}}{\text{Jumlah Kelas (K)}}$$

$$= \frac{\text{Skor tertinggi dikurangi skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$= \frac{5 - 1}{5}$$

$$= 0,80$$

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden dari masing-masing pernyataan yaitu :

1. Skor rata-rata antara 4,20 - 5,00 = Sangat baik sekali
2. Skor rata-rata antara 3,39 - 4,19 = Baik sekali
3. Skor rata-rata antara 2,58 - 3,38 = Baik
4. Skor rata-rata antara 1,77 - 2,57 = Kurang baik
5. Skor rata-rata antara 0,96 - 1,76 = Kurang baik sekali

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden dari masing-masing pernyataan yaitu :

1. Skor rata-rata antara 4,20 - 5,00 = Sangat baik sekali
2. Skor rata-rata antara 3,39 - 4,19 = Baik sekali

- 3. Skor rata-rata antara 2,58 - 3,38 = Baik
- 4. Skor rata-rata antara 1,77 - 2,57 = Kurang baik
- 5. Skor rata-rata antara 0,96 - 1,76 = Kurang baik sekali

HASIL PENELITIAN

Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba

Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba meliputi: 1)partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PNPM Mandiri Perkotaan; 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri; 3) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil PNPM Mandiri; 4) partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil PNPM Mandiri. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan masing-masing partisipasi masyarakat dalam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program PNPM Mandiri. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri dapat dilihat dari indikator-indikator mengikuti rapat dalam penyusunan dan pengesahan rencana program; memberikan ide atau masukan tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan rencana; memberikan ide atau masukan tentang penetapan sumber-sumber pembiayaan program yang direncanakan; memberikan ide atau masukan tentang siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan program sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki; dan menyebarluaskan rencana program kepada masyarakat.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 : Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba.

No	Klasifikasi	Bobot (B)	Frekuensi (F)	B x F	Persentase (%)
1	Selalu	5	4	20	1,92
2	Sangat sering	4	24	96	9,20
3	Sering	3	176	526	50,43
4	Kadang-kadang	2	192	384	36,82
5	Tidak pernah	1	17	17	1,63

Jumlah	413	1043	100
or = $\frac{1043}{413} = 2,52$			Sk
Kategori = Kurang Baik			Ka

Sumber: Jawaban kuesioner no. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Tahun 2013

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba: 1,92 persen menyatakan selalu; 9,20 persen menyatakan sangat sering; 50,43 menyatakan sering; 36,82 persen menyatakan kadang-kadang; dan 1,63 persen menyatakan tidak pernah. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori kurang baik, yaitu nilai skor rata-rata 2,52 berada pada skor rata-rata antara 1,77 sampai dengan 2,57.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dilihat dari indikator-indikator: menjadi tenaga pelaksana program PNPM Mandiri; memberikan sumbangan berupa uang dalam program PNPM Mandiri memberikan sumbangan berupa barang atau material dalam program PNPM Mandiri; memberikan sumbangan berupa uang dan barang atau uang dan tenaga atau barang dan tenaga dalam program PNPM Mandiri; dan memberikan sumbangan berupa uang, barang, dan tenaga dalam program PNPM Mandiri.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba.

No	Klasifikasi	Bobot (B)	Frekuensi (F)	B x F	Persentase (%)
1	Selalu	5	8	40	2,67
2	Sangat sering	4	64	256	22,29
3	Sering	3	241	723	58,33
4	Kadang-kadang	2	76	152	14,10
5	Tidak pernah	1	24	24	2,61
Jumlah			413	1195	100,00
Skor = $\frac{1195}{413} = 2,95$					
Kategori = Baik					

Sumber: Jawaban kuesioner no. 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4 di atas dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba: 2,67 persen menyatakan selalu; 22,29 persen menyatakan sangat sering; 58,33 persen menyatakan sering; 14,10 persen menyatakan kadang-kadang; dan 2,61 persen menyatakan tidak pernah. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori baik, yaitu nilai skor rata-rata 2,93 berada pada skor rata-rata antara 2,58 sampai dengan 3,38.

3) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil-Hasil Program PNPM Mandiri.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil program PNPM Mandiri dapat dilihat dari indikator-indikator: memanfaatkan fasilitas program PNPM Mandiri yang telah dibuat; memelihara kebersihan fasilitas program PNPM Mandiri; memelihara keindahan fasilitas program PNPM Mandiri; memelihara keamanan fasilitas program PNPM Mandiri; dan memelihara kenyamanan fasilitas program PNPM Mandiri.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil program PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil-hasil Program PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba.

No	Klasifikasi	Bobot (B)	Frekuensi (F)	B x F	Persentase (%)
1	Selalu	5	8	40	2,88
2	Sangat Sering	4	62	248	17,84
3	Sering	3	295	885	63,67
4	Kadang-kadang	2	87	174	12,52
5	Tidak Pernah	1	43	43	3,09
Jumlah			413	1390	100,00
$\text{Skor} = \frac{1390}{413} = 3,37$					
Kategori = Baik					

Sumber: Jawaban Kuesioner no : 13, 14, 15, 16 dan 17 Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel 5 diatas dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba : 2,88 persen menyatakan selalu; 17,84 persen menyatakan sangat sering; 63,67 persen menyatakan sering; 12,52 persen menyatakan kadang-kadang; dan 3,09 persen menyatakan tidak pernah. Dan secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori baik, yaitu nilai skor rata-rata 3,37 berada pada rata-rata skor rata-rata antara 2,58 sampai dengan 3,38.

4) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengevaluasi Hasil Program PNPM Mandiri.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil program PNPM Mandiri dapat dilihat dari indikator-indikator: mengikuti pertemuan evaluasi hasil program PNPM Mandiri; memberikan masukan, ide atau gagasan dalam pertemuan evaluasi hasil program PNPM Mandiri; dan melestarikan hasil-hasil program PNPM Mandiri. Sedangkan untuk mengikuti bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil program PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengevaluasi Hasil Program PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba.

No	Klasifikasi	Bobot (B)	Frekuensi (F)	B x F	Persentase (%)
1	Selalu	5	12	60	2,88
2	Sangat Sering	4	38	152	17,84
3	Sering	3	129	387	63,67
4	Kadang-kadang	2	201	402	12, 52
5	Tidak Pernah	1	33	33	3,09
Jumlah			413	1034	100,00
$\text{Skor} = \frac{1034}{413} = 2,50$ Kategori = Baik					

Sumber: Jawaban Kuesioner no: 18, 19 dan 20 tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut di atas dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba: 2,88 persen menyatakan selalu; 17,84 persen menyatakan sangat sering; 63,67 persen menyatakan sering; 12,52 persen menyatakan kadang-kadang; dan 3,09 persen menyatakan tidak pernah. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam

mengevaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori kurang baik, yaitu nilai skor rata-rata 2,50 berada pada skor rata-rata antara 1,77 sampai dengan 2,57.

Selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba

No	Klasifikasi	Skor	Persentase (%)
1	Perencanaan Program	2,52	22,26
2	Pelaksanaan Program	2,93	25,88
3	Pemanfaatan Hasil Program	3,37	29,77
4	Mengevaluasi Hasil Program	2,50	22,09
Jumlah		11,32	100,00
$\text{Skor} = \frac{11,32}{4} = 2,83$			
Kategori = Baik			

Sumber: Jawaban Kuesioner no. 1 s.d 20 tahun 2013

Berdasarkan tabel 7 di atas dinyatakan bahwa partisipasi dalam perencanaan program PNPM Mandiri yaitu, 22,26 persen; dalam tahap pelaksanaan program PNPM Mandiri, yaitu 25,88 persen; dalam pemanfaatan hasil program PNPM Mandiri, yaitu 29,77 persen; dan dalam mengevaluasi hasil-hasil program PNPM Mandiri, yaitu 22,09 persen. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori baik, yaitu skor rata-rata total 2,83 berada pada skor rata-rata 2,58 sampai dengan 3,38.

Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri di Kabupaten Bulukumba

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung adalah sebagai berikut:

1) Situasi yang Kondusif

Suasana yang mendorong dan merangsang masyarakat untuk berpartisipasi merupakan prasyarat yang sangat penting di dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Situasi yang kondusif yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat antara lain; a) rendahnya tingkat kriminalitas

dan kerusuhan antar warga; b) kerukunan hidup antar warga di Kabupaten Bulukumba sangat baik.

2) Dukungan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang yang dihormati dan menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang besar merupakan pendukung di dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, baik dalam tahap perencanaan program PNPM, tahap pelaksanaan program PNPM, tahap pemanfaatan program PNPM, maupun tahap mengevaluasi hasil PNPM Mandiri.

3) Intervensi Pemerintah

Mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pengevaluasian yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja dan tidak menentukan atau mengintervensi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan semangat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Karena masyarakat sadar kegiatan dalam program ini adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri.

4) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sosial budaya dapat diartikan sebagai adat istiadat suatu daerah atau kebiasaan hidup dalam kelompok masyarakat tertentu yang masih ditaati. Salah satu kegiatan sosial budaya ini adalah budaya gotong royong, dimana merupakan kekuatan membangun atas dasar kerja sama antar masyarakat setempat.

Kegiatan gotong royong bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba sangat berperan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Semangat kegotongroyongan ini tidak terlepas dari kesediaan masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam memberi dukungan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berupa tenaga, pikiran, uang atau material.

Faktor Penghambat

Yaitu faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, antara lain:

1) Kurangnya Volume Sosialisasi dari Aparat Pemerintahan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat berjalan dengan baik, bila melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Program PNPM sendiri yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong miskin. Pada kenyataannya masyarakat tidak banyak tahu dan tidak banyak memperoleh informasi yang tepat dan jelas mengenai PNPM Mandiri yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai yang diharapkan dalam program PNPM Mandiri. Penyebab masalah ini adalah kurang aktifnya aparat pemerintah baik ditingkat Kabupaten, kecamatan, maupun desa dalam mensosialisasikan program PNPM Mandiri sehingga masyarakat kurang

merespon kegiatan program tersebut.

2) Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk dana dan materi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Bulukumba masih dapat dikatakan rendah. Masyarakat tetap tidak mau disalahkan karena mereka beranggapan bahwa untuk makan saja sulit, buat apa menyumbang uang untuk PNPM Mandiri.

Ketidakpedulian masyarakat dalam pemeliharaan hasil program PNPM Mandiri juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di tingkat desa berkaitan dengan pemeliharaan gorong-gorong atau got. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut bukan lagi merupakan kewajiban kami dalam pemeliharannya, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

3) Terbatasnya Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada dasarnya merupakan posisi yang sentral dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba. Sumberdaya manusia yang ada di desa/kelurahan memegang peran penting dalam program PNPM Mandiri karena manusia itu sendiri merupakan objek sekaligus subjek program PNPM Mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan adalah baik hal tersebut bisa dilihat dari skor rata-rata keseluruhan yaitu 2,83 yang berada di interval 2,58 - 3,38.

2) Faktor yang mendukung pada pelaksanaan

partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba adalah: a) situasi masyarakat Kabupaten Bulukumba yang kondusif. Hal tersebut bisa dilihat dari rendahnya tingkat kriminalitas dan kerusuhan antar warga dan baiknya kerukunan hidup antar warga; b) dukungan tokoh masyarakat sangat baik terhadap program PNPM Mandiri; c) intervensi Pemerintah sangat kecil dan ia hanya sebagai fasilitator saja dalam kegiatan program PNPM Masih; d) kegiatan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bulukumba sangat baik.

Adapun faktor yang menghambat pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bulukumba adalah; masih kurangnya volume sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tingkat kesadaran masyarakat dalam hal partisipasi pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk dana dan materi. Terbatasnya Sumberdaya manusia yang ada di desa di Kabupaten Bulukumba.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hendaknya aparat pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun desa meningkatkan/mengefektifkan sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada masyarakat. Dari peningkatan sosialisasi ini diharapkan akan tumbuh dan semakin baik tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk menutup/mengurangi terbatasnya Sumberdaya manusia, hendaknya pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya yang mengarah pada peningkatan Sumberdaya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Silalahi, Ulbert, 1989, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep Teori dan Dimensi)*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gie, The Liang dan Soetarto, 1980, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2011, *Administrasi Pembangunan (Konsep, dimensi dan strateginya)* Bumi Aksara, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agus, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1982, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fiagam, Alfia, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat*, STPDN, Jatinangor.
- Nasution, Zulkarnaen, 1987, *Komunikasi Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3S*, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastik, Peter, 2000 *Barishing bureaucracy; The Five Strategies for Reinventing Government (Terjemah)*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Agustina, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn N, William, 1999, *Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gramedia University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Halim Kusnan, 2002, *Bahas Ajar Analisis Kebijakan Publik*, STPDN, Jatinangor.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Huraerah, Abu, 2008, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Humaniora, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta.
- Suhendra, 2006, Peranan Birokrasi dalam pemberdayaan Masyarakat, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Sastro Poetro, 1988, Partisipasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Bina Aksara, Jakarta.
- Team Penyusun PNPM, 2007, Pedoman Ilmu PNPM Mandiri, Direktorat Jenderal Cipta Karya DPU, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1990 b, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta.
- Yusri, Nurmaya, 1993, Beberapa alternatif dan model pendekatan dalam pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, FISIP UNPAD, Bandung.
- Syamsi, Ibnu, 1986, Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan Pemograman dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional, Rajawali, Jakarta.